

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP)  
DAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH (SAPD) TERHADAP  
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
(Studi Empiris pada Instansi Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi)**

**Skripsi**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi (S1) Program Studi Akuntansi  
Universitas Negeri Padang*



Oleh:

**RESTI YULENTINOVA**  
**2006/77780**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2011**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

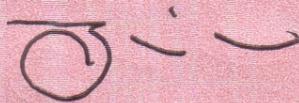
**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN  
(SAP) DAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH (SAPD)  
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
(Studi Empiris pada Instansi Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi)**

**Nama** : RESTI YULENTINOVA  
**NIM/BP** : 77780/2006  
**Program Studi** : Akuntansi  
**Keahlian** : Akuntansi Sektor Publik  
**Fakultas** : Ekonomi

Padang, Februari 2011

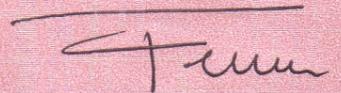
**Disetujui Oleh:**

**Pembimbing 1**



**Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak**  
NIP. 19580519 199001 1 001

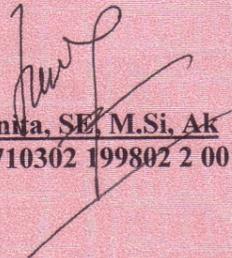
**Pembimbing 2**



**Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak**  
NIP. 19730213 199903 1 003

**Mengetahui,**

**Ketua Prodi Akuntansi**



**Lili Anita, SE, M.Si, Ak**  
NIP. 19710302 199802 2 001

**HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI**

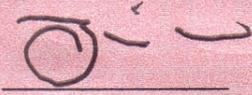
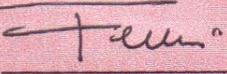
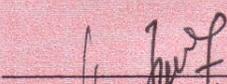
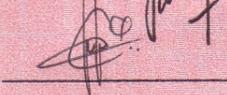
*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Padang*

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN  
(SAP) DAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH (SAPD)  
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
(Studi Empiris Pada Instansi Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi)**

Nama : Resti Yulentinova  
BP/NIM : 2006/77780  
Program Studi : Akuntansi  
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik  
Fakultas : Ekonomi

Padang, Februari 2011

**Tim Penguji**

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	Dr.H.Efrizal Sofyan, SE, M.Si, Ak	
2.	Sekretaris	Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak	
3.	Anggota	Lili Anita, SE, M.Si, Ak	
4.	Anggota	Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak	

## ABSTRAK

**Resti Yulentinova (2006/77780) Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi. Skripsi. Universitas Negeri Padang. 2011**

**Pembimbing I : Dr.H. Efrizal Sofyan, SE, M.si, Ak**

**Pembimbing II : Fefri Indra Arza, SE, MSc, Ak**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji 1) Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 2) Pengaruh penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Jenis penelitian ini digolongkan sebagai penelitian yang bersifat kausatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bukittinggi. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel secara total sampling yaitu dengan menjadikan seluruh populasi sebagai sampel. Data dikumpulkan dengan menyebarkan langsung kuesioner kepada responden yang bersangkutan. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi berganda.

Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa: 1) penerapan standar akuntansi pemerintahan tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan  $t_{hitung} < t_{tabel}$  yaitu  $0,460 < 1,7171$  (sig  $0,650 > \alpha 0,05$ ) yang berarti  $H_1$  ditolak. 2) penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $2,937 > 1,7171$  (sig  $0,008 < \alpha 0,05$ ) yang berarti  $H_2$  diterima

Untuk peneliti selanjutnya dapat dilakukan perluasan sampel dan variabel penelitian untuk menemukan variabel-variabel lain yang mungkin berpengaruh kuat dengan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah

## **KATA PENGANTAR**

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih terutama kepada Bapak Dr. H. Efrizal Syofyan, S.E, M.Si, Ak sebagai pembimbing I dan Bapak Fefri Indra Arza, S.E, M.Sc, Ak sebagai pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan tenaga untuk membimbing penulis selama ini. Selain itu, tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
4. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah membantu dalam kelancaran Administrasi dan perolehan buku-buku penunjang skripsi.

5. Teristimewa buat kedua orang tuaku Adlis, Syamsuniar dan seluruh keluarga besar penulis atas kasih sayang dan bantuan moril dan materil.
6. Teman-teman di Fakultas Ekonomi yang banyak memberikan saran, bantuan dan dorongan dalam penyusunan skripsi ini, terutama teman-teman Program Studi Akuntansi Angkatan 2006.
7. Dan semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dengan segala keterbatasan yang ada, penulis tetap berusaha untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga penelitian berikutnya akan menjadi lebih baik lagi. Akhir kata, penulis barharap semoga skripsi ini mempunyai arti dan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca.

Padang, Januari 2011

Penulis

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	ix
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	6
C. Pembatasan Masalah .....	6
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Tujuan Penelitian .....	7
F. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II. KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN</b>	
<b>HIPOTESIS</b> .....	9
A. Kajian Teori .....	9
1. Laporan Keuangan .....	9

a.	Pengertian Laporan Keuangan .....	9
b.	Tujuan Laporan Keuangan .....	10
c.	Komponen Laporan Keuangan .....	13
d.	Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan.....	14
2.	Standar Akuntansi Pemerintahan .....	17
a.	Standar Akuntansi .....	17
b.	Standar Akuntansi Pemerintahan .....	17
c.	Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan .....	19
d.	Unsur Laporan Keuangan .....	21
3.	Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.....	24
a.	Definisi Akuntansi .....	24
b.	Sistem Akuntansi .....	26
c.	Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah .....	30
d.	Siklus Akuntansi Pemerintah Daerah .....	33
B.	Penelitian Relevan .....	34
C.	Kerangka Konseptual .....	36
D.	Hipotesis .....	37
<b>BAB III.</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
A.	Jenis Penelitian .....	38
B.	Populasi Dan Sampel .....	38
C.	Jenis data dan Sumber data.....	40
D.	Teknik Pengumpulan Data .....	40
E.	Variabel Penelitian.....	41

F. Instrumen Penelitian .....	41
G. Uji Validitas dan Reliabilitas .....	43
H. Hasil Uji Coba Instrumen .....	44
I. Uji Asumsi Klasik .....	45
J. Teknik Analisis Data .....	46
K. Definisi Operasional .....	50
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>52</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	52
B. Demografi Responden .....	53
C. Statistik Deskriptif .....	56
D. Uji Valid dan Reliabilitas .....	57
E. Uji Asumsi Klasik .....	59
F. Deskriptif Variabel Penelitian .....	62
G. Hasil Penelitian .....	67
H. Pembahasan .....	72
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan .....	76
B. Keterbatasan .....	76
C. Saran .....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>80</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Daftar nama SKPD.....	39
2. Skala Pengukuran .....	42
3. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian .....	42
4. Nilai <i>Cronbach's Alpha &amp; Corrected Item Total Correlation</i> .....	44
5. Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner .....	52
6. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	53
7. Karakteristik Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan .....	54
8. Karakteristik Responden Berdasarkan Keahlian Yang telah Ditempuh ....	55
9. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama bekerja .....	56
10. Statistik Deskriptif .....	57
11. Nilai <i>Corrected Item Total Correlation</i> Penelitian .....	58
12. Nilai <i>Cronbach's Alpha</i> Penelitian .....	58
13. Uji Normalitas .....	60
14. Uji Multikolinearitas .....	61
15. Uji Heterokedastisitas .....	62
16. Distribusi Frekuensi Variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemda.....	63
17. Distribusi Frekuensi Variabel Standar Akuntansi Pemerintahan.....	64
18. Distribusi Frekuensi Variabel Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah .....	66
19. Uji Koefisien Determinasi .....	68
20. Koefisien Regresi Berganda.....	68
21. Uji F Hitung .....	70

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
1. Sistem Akuntansi .....	29
2. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah .....	33
3. Kerangka Konseptual .....	37

## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran

1. Surat Penelitian
2. Kuesioner Penelitian
3. Uji Validitas dan Reliabilitas *Pilot Test*
4. Uji Validitas dan Reliabilitas Penelitian
5. Uji Asumsi Klasik
6. Analisis Data
7. Uji F
8. Distribusi Frekuensi Skor Variabel

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dengan bergulirnya UU Nomor 22 tahun 1999 yang telah di revisi menjadi UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 tahun 1999 yang direvisi menjadi UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, dan aturan pelaksanaannya, khususnya PP Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah maka terhitung tahun anggaran 2001, telah terjadi pembaharuan di dalam manajemen keuangan daerah. Dengan adanya otonomi ini, daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah.

Namun demikian, dengan kewenangan yang luas tersebut tidaklah berarti bahwa pemerintah daerah dapat menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sekehendaknya, tanpa arah dan tujuan yang jelas. Hak dan kewenangan yang luas yang diberikan kepada daerah, pada hakekatnya merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan, baik kepada masyarakat di daerah maupun kepada Pemerintah Pusat.

Pembaharuan manajemen keuangan daerah di era otonomi daerah ini, ditandai dengan perubahan yang sangat mendasar mulai dari sistem penganggarannya, perbendaharaan sampai kepada pertanggungjawaban laporan keuangannya. Sebelum bergulirnya otonomi daerah, pertanggungjawaban laporan keuangan daerah yang harus disiapkan oleh Pemerintah Daerah hanya berupa Laporan Perhitungan Anggaran dan Nota Perhitungan dan sistem yang digunakan untuk menghasilkan laporan tersebut.

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dapat dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 32 ayat (1), menyatakan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (*stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan, karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi

akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuan dari laporan keuangan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki. Pemenuhan tujuan laporan keuangan tersebut akan bermanfaat, berkualitas dan dapat memenuhi tujuannya jika memenuhi empat karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu: dapat dipahami (*understandability*), relevan (*relevance*), andal (*reliability*), dan dapat dibandingkan (*comparability*).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan serta realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan laporan keuangan pemerintah adalah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 menyatakan bahwa, Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Di dalam sistem pertanggungjawaban keuangan daerah, sistem lama yang selama ini digunakan oleh Pemda baik pemerintah propinsi maupun pemerintah

kabupaten/kota yaitu Manual Administrasi Keuangan Daerah (MAKUDA) yang diterapkan sejak 1981 sudah tidak dapat lagi mendukung kebutuhan Pemda untuk menghasilkan laporan keuangan dalam bentuk neraca dan laporan arus kas sesuai PP 105/2000 pasal 38. Sistem Akuntansi merupakan alat untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan standar akuntansi merupakan pedoman yang mengatur bagaimana laporan keuangan tersebut disajikan, Mahmudi(2007).

Menurut Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang akuntansi keuangan daerah, sistem akuntansi pemerintah daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai pelaporan keuangan dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang mengacu pada peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. Dalam hal ini terlihat bahwa sistem akuntansi sangat diperlukan dalam pengelolaan keuangan di daerah agar menghasilkan pelaporan keuangan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan pada publik.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) untuk laporan keuangan kota Bukittinggi adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Namun Badan Anggaran (Bangar) DPRD Bukittinggi menanyakan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Bukittinggi TA 2009. Dalam LKPD Bukittinggi tersebut BPK menemukan ketidakjelasan penggunaan dana pada Dinas Pengelolaan Pasar sebesar Rp. 3,6 miliar dan penyertaan modal Pemko Bukittinggi ke Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebesar Rp. 1,8 miliar.

Selain itu, hasil temuan BPK lainnya terkait LKPD Bukittinggi yang diduga merugikan keuangan Negara yaitu penggunaan anggaran pada Dinas Pendidikan sebesar Rp. 162 juta, Sekretariat DPRD sebesar Rp. 70 juta dan sejumlah asset Pemko Bukittinggi tidak memiliki sertifikat. (*sumber Indowarta 22 Juli 2010*).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sherly (2008), yang meneliti mengenai penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada pemerintahan kota Padang, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Padang secara implisit belum mampu menerapkan SAP, hal ini dapat dilihat dari banyaknya Dinas di Kota Padang yang belum selesai dalam menyusun laporan keuangan. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Siska (2009), menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Siska (2009) yang berjudul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah” (Studi BPKP Provinsi Sumatera Barat). Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan yaitu peneliti melakukan penelitian pada instansi Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi, sedangkan Siska meneliti pada BPKP Provinsi Sumatera Barat. Dan juga peneliti mencoba menambahkan variabel lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan yaitu sistem akuntansi pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian diatas dan pentingnya laporan keuangan dalam mewujudkan Akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **”Pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian diatas masalah yang dapat diidentifikasi adalah :

1. Apakah penyusunan Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Bukittinggi telah berstandar pada Peraturan Pemerintah yang berlaku?
2. Sejauhmana proses penyusunan laporan keuangan yang berjalan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah?
3. Sejauhmana penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi?
4. Sejauhmana penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi?
5. Kendala-Kendala apa yang dihadapi oleh Pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan yang berstandar pada SAP?

## **C. Pembatasan Masalah**

Dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas, yaitu sejauhmana pengaruh penerapan Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP) dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Sejauhmana penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi?
2. Sejauhmana penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi.
2. Pengaruh penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi.

#### **F. Manfaat Penelitian**

1. Bagi penulis  
Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis sehubungan dengan akuntansi di pemerintahan.

## 2. Bagi Akademik

Sebagai khasanah penelitian terutama di bidang Sektor Publik, dan sebagai referensi untuk diteliti lebih lanjut oleh teman-teman mahasiswa di lingkungan Akademika.

## 3. Bagi Sektor Publik

Dapat dijadikan sebagai masukan untuk mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan keuangan di Sektor Publik.

## 4. Bagi Penelitian Selanjutnya

Agar dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dengan menambahkan variabel-variabel lain yang juga dapat mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Laporan Keuangan**

###### **a. Pengertian Laporan Keuangan**

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar akuntansi pemerintahan, laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006, Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Negara dan Daerah selama suatu periode. Sedangkan Indra (2006) mendefinisikan laporan keuangan adalah representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan suatu entitas.

Dari defenisi-defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan adalah apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan

tersebut dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Namun demikian, perlu disadari bahwa laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Secara umum, laporan keuangan menggambarkan pengaruh dari kejadian masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan.

#### **b. Tujuan Laporan Keuangan**

Menurut Standar Akuntansi Keuangan No 1 dalam Sofyan (2007), Tujuan Laporan Keuangan adalah:

1. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.
2. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai.
3. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*), atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Menurut Mardiasmo (2002) tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik sebagai berikut:

1. Kepatuhan dan Pengelolaan (*Compliance and Stewardship*)

Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan.

2. Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif (*Accountability and Retrospective Reporting*)

Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.

3. Perencanaan dan Informasi Otorisasi (*Planning and Authorization Information*)

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang. Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana.

4. Kelangsungan Organisasi (*Viability*)

Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pengguna dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa (pelayanan) di masa yang akan datang.

5. Hubungan Masyarakat (*Public Relation*)

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pengguna yang dipengaruhi karyawan dan masyarakat.

Laporan keuangan berfungsi sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

6. Sumber Fakta dan Gambaran (*Source of Facts and Figures*)

Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih dalam.

Dalam Standar akuntansi pemerintahan (SAP,2006) Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran

5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya
6. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, serta resiko dan ketidakpastian yang terkait.

### **c. Komponen Laporan Keuangan**

Dalam PP No. 8 Tahun 2006 laporan keuangan pemerintah pusat/daerah setidak-tidaknya terdiri dari:

1. Laporan realisasi anggaran  
Menyajikan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diperbandingkan dengan anggarannya dan dengan realisasi periode sebelumnya.
2. Neraca  
Menyajikan aset, utang, dan ekuitas dana yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya.

3. Laporan arus kas

Menyajikan arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan, arus kas dari aktivitas pembiayaan, dan arus kas dari aktivitas non anggaran yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya.

4. Catatan atas laporan keuangan

**d. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan**

Dalam PP Nomor 24 tahun 2005, karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

Informasi yang relevan:

- a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi di masa lalu.

b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c. Tepat Waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d. Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi dapat dicegah.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.

Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

a. Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b. Dapat Diverifikasi (*variability*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c. Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

## **2. Standar Akuntansi Pemerintahan**

### **a. Standar Akuntansi**

Akuntansi memiliki kerangka teori konseptual yang menjadi dasar pelaksanaan teknik-tekniknya, kerangka dasar konseptual ini terdiri dari standar (teknik, prinsip) dan praktiknya yang sudah diterima oleh umum karena kegunaannya dan kelogisannya.

Standar akuntansi mencakup konvensi, peraturan, dan prosedur yang sudah disusun dan disahkan oleh lembaga resmi (*Standard Setting Body*) pada saat tertentu. Standar ini merupakan konsensus pada kala itu tentang pencatatan sumber-sumber ekonomi, kewajiban, modal, hasil, biaya, dan perubahannya dalam bentuk laporan keuangan. Dalam standar ini dijelaskan transaksi apa yang harus dicatat, bagaimana mencatatnya, dan bagaimana mengungkapkannya dalam laporan keuangan yang akan disajikan.

Standar akuntansi ini merupakan masalah penting dalam profesi dan pemakai laporan yang memiliki kepentingan terhadapnya. Oleh karena itu, mekanisme penyusunan standar akuntansi harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat memberikan kepuasan kepada semua pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan.

### **b. Standar akuntansi pemerintahan**

Salah satu upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah

diterima secara umum. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Dalam Standar akuntansi pemerintahan (2006), SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar akuntansi pemerintahan (SAP) dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar akuntansi pemerintahan, yang selanjutnya disebut PSAP. PSAP terdiri dari sebelas pernyataan standar:

1. PSAP No 01 tentang Penyajian laporan keuangan
2. PSAP No 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran
3. PSAP No 03 tentang Laporan Arus Kas
4. PSAP No 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan
5. PASP No 05 tentang Akuntansi Persediaan
6. PSAP No 06 tentang Akuntansi Investasi
7. PSAP No 07 tentang Akuntansi Aset Tetap
8. PSAP No 08 tentang Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan
9. PSAP No 09 tentang Akuntansi Kewajiban

10. PSAP No 10 tentang Koreksi Kesalahan

11. PSAP No 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasi

**c. Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan**

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam penyusunan standar akuntansi.

Dalam Standar akuntansi pemerintahan (2006) delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah:

a. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca.

b. Prinsip Nilai Historis

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan.

c. Prinsip Realisasi

Bagi pemerintah, pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama satu tahun fiskal akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut.

d. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*substance Over Form*)

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitas.

e. Prinsip Periodisitas (Periodicity)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

f. Prinsip Konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal).

g. Prinsip Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure*)

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

h. Prinsip Penyajian Wajar (*Fair Presentation*)

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **d. Unsur Laporan Keuangan**

##### 1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Unsur-unsur yang tercakup dalam Laporan Realisasi Anggaran :

##### a. Pendapatan

Pendapatan adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

##### b. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

##### c. Transfer

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

d. Pembiayaan (*financing*)

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali.

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Unsur yang terdapat dalam Neraca:

a. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara.

b. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

c. Ekuitas Dana

Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

### 3. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.

Unsur yang terdapat dalam Laporan Arus Kas:

#### a. Penerimaan kas

Semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Negara/Daerah.

#### b. Pengeluaran kas

Semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara/Daerah.

### 4. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau Rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas.

Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan:

- a. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-Undang APBN/ Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target
- b. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan
- c. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi – transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya

- d. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh standar akuntansi pemerintahan yang belum disajikan pada lembaran muka (*on the face*) laporan keuangan.
- e. Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas
- f. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan.

### **3. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)**

#### **a. Definisi Akuntansi**

Menurut Deddi (2007), Akuntansi didefinisikan secara tepat dengan menjelaskan tiga karakteristik penting dari akuntansi, yaitu pengidentifikasian, pengukuran dan pengkomunikasian informasi keuangan tentang entitas ekonomi kepada pemakai berkepentingan.

Di samping itu, menurut Accounting Principle Board dalam Abdul (2008) mendefinisikan akuntansi sebagai berikut:

“Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa yang fungsinya menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan tentang entitas ekonomi yang dimaksudkan agar berguna dalam mengambil keputusan ekonomi, membuat pilihan-pilihan nalar diantara berbagai alternatif arah tindakan”

Abdul (2008) mendefinisikan akuntansi sebagai berikut :

“Akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak yang memerlukan”.

Dari kedua definisi tersebut dapat diketahui bahwa fungsi/peran akuntansi adalah menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan tentang entitas ekonomi yang mana informasi yang dihasilkan berguna sebagai input yang dipertimbangkan dalam mengambil keputusan rasional.

Berdasarkan tujuan pemakaiannya bidang akuntansi dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian utama (Deddi,2007) yaitu:

1. Akuntansi komersial/*commercial accounting*

Akuntansi komersial menginput data akuntansi yang digunakan untuk memberikan informasi keuangan kepada manajemen, pemilik modal, penanam modal, kreditor dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut.

2. Akuntansi sektor publik

Akuntansi sektor publik memberikan informasi keuangan dari entitas yang tidak mencari laba. Akuntansi pemerintahan (sektor publik) memiliki tiga tujuan pokok (Deddi,2007) yaitu:

- a. Pertanggung jawaban

Akuntansi pemerintahan harus memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat yang berguna bagi pihak yang bertanggung jawab terhadap operasi unit-unit pemerintahan.

- b. Manajerial

Akuntansi pemerintahan juga harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,

pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan penilaian kinerja pemerintah.

c. Pengawasan

Akuntansi pemerintahan harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

3. Akuntansi sosial

Akuntansi sosial memberikan informasi yang dihasilkan adalah informasi yang bersifat makroekonomi seperti neraca pembayaran negara, rekening pembayaran negara, rekening arus dana, rekening pendapatan dan produksi nasional yang khusus diterapkan pada lembaga makro yang melayani perekonomian nasional.

**b. Sistem akuntansi**

Dalam ilmu akuntansi terdapat sistem pencatatan dan dasar akuntansi. Adanya sistem pencatatan disebabkan oleh salah satu tahap dalam akuntansi yaitu tahap pencatatan. Terdapat beberapa sistem pencatatan dalam akuntansi (Abdul,2008) yaitu:

1. *Single entry*

Sistem pencatatan *single entry* sering juga disebut dengan sistem tata buku tunggal. Dalam sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatat satu kali, pencatatan seperti ini disebut dengan pembukuan. Kelebihan dari sistem ini adalah sederhana dan mudah dipahami. Namun, sistem ini memiliki kelemahan diantaranya kurang bagus untuk pelaporan,

sulit untuk menemukan kesalahan pembukuan yang terjadi dan sulit dikontrol.

## 2. *Double entry*

Sistem pencatatan *double entry* sering disebut juga dengan sistem tata buku berpasangan. Menurut sistem ini pada dasarnya, suatu transaksi ekonomi akan dicatat dua kali. Pencatatan dengan sistem ini sering disebut dengan istilah menjurnal. Setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan persamaan akuntansi. Persamaan dasar akuntansi merupakan alat bantu untuk memahami sistem pencatatan ini. Persamaan dasar akuntansi dalam akuntansi keuangan daerah sebagai berikut:

$$\text{Aktiva} + \text{Belanja} = \text{Utang} + \text{Ekuitas Dana} + \text{Pendapatan}$$

Transaksi yang berakibat bertambahnya aktiva maupun belanja akan dicatat pada sisi debit sedangkan yang berakibat berkurangnya aktiva akan dicatat pada sisi kredit.

## 3. *Triple entry*

Sistem pencatatan *triple entry* adalah pelaksanaan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan *double entry* ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran.

Dalam memahami sistem pencatatan, dasar akuntansi berperan dalam menentukan saat perencanaan suatu transaksi ekonomi. Menurut Parno (2001) dalam Abdul (2008), basis atas dasar akuntansi adalah himpunan dari standar-standar akuntansi yang menetapkan kapan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lainnya yang harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Dari

definisi tersebut, adanya masalah pengakuan (*recognition*) atas dampak keuangan dari transaksi.

Dalam praktik akuntansi pemerintahan, terdapat empat macam basis akuntansi yang digunakan (Deddi,2007) antara lain:

#### 1. Basis Kas

Pada dasar ini, transaksi diakui atau dicatat apabila menimbulkan perubahan/berakibat pada kas yaitu berdasarkan kas masuk dan kas keluar. Apabila suatu transaksi ekonomi tidak berpengaruh pada kas maka transaksi tersebut tidak akan dicatat

#### 2. Basis Akrua

Basis akrua adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi atau peristiwa lainnya pada saat transaksi atau peristiwa tersebut terjadi (dan bukan hanya pada saat kas/setara kas yang diterima atau dibayar). Dalam hal ini, transaksi, transaksi atau peristiwa-peristiwa dicatat dalam catatan akuntansi dan diakui dalam laporan keuangan pada periode terjadinya. Basis akrua menjadi acuan Pemda dalam menyusun laporan keuangannya semenjak tahun 2007.

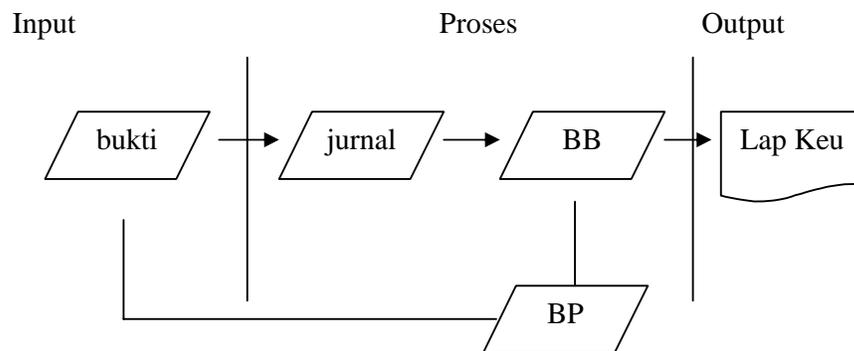
#### 3. Basis kas modifikasi

Basis kas modifikasi merupakan kombinasi dasar kas dengan dasar akrua. Penerapan basis akuntansi ini menuntut bendahara pengeluaran mencatat transaksi dengan basis kas selama tahun anggaran dan melakukan penyesuaian pada akhir tahun anggaran berdasarkan basis akrua.

#### 4. Basis akrual modifikasi

Basis akuntansi ini mencatat transaksi dengan menggunakan basis kas untuk transaksi-transaksi tertentu dan menggunakan basis akrual untuk sebagian besar transaksi.

Akuntansi merupakan suatu kesatuan yang terdiri atas subsistem-subsistem atau kesatuan lebih kecil yang saling berhubungan dan mempunyai tujuan tertentu. Suatu sistem yang mengolah input (masukan) menjadi output (keluaran) berupa laporan keuangan (Abdul,2008). Input sistem akuntansi adalah bukti-bukti transaksi dalam bentuk dokumen atau formulir, sedangkan output berbentuk laporan keuangan. Dalam proses akuntansi terdapat beberapa catatan yang dibuat yaitu jurnal, buku besar (BB) dan buku pembantu (BP)



Gambar 1: Sistem Akuntansi

Menurut Sugiri (2001) dalam Abdul (2008), sistem akuntansi tersebut dapat dijelaskan secara rinci melalui siklus akuntansi yaitu tahap-tahap yang terdapat dalam sistem, seperti:

1. Mendokumentasikan transaksi keuangan dalam bukti dan melakukan analisis transaksi keuangan tersebut.

2. Mencatat Transaksi keuangan dalam buku jurnal
3. Meringkas dalam buku besar, transaksi-transaksi keuangan yang sudah dijurnal. Tahap ini disebut posting atau mengakunkan.
4. Menentukan saldo-saldo buku besar diakhir periode dan menuangkannya dalam Neraca Saldo
5. Menyesuaikan buku besar berdasarkan pada informasi yang paling *up-to-date* (mutakhir)
6. Menentukan saldo-saldo buku besar setelah penyesuaian dan menuangkannya dalam Neraca Saldo Setelah Penyesuaian
7. Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Neraca Saldo Setelah Penyesuaian.
8. Menutup buku besar.
9. Menentukan Saldo-saldo buku besar dan menuangkannya dalam Neraca Saldo Setelah Tutup Buku.
10. Menganalisa Laporan Keuangan.

**c. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah**

Menurut Deddi (2007) Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) adalah Serangkaian prosedur, mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Sistem akuntansi pemerintah daerah memiliki beberapa karakteristik, diantaranya:

## 1. Basis Akuntansi

SAPD menggunakan basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan basis akrual untuk neraca. Dengan basis kas, pendapatan diakui dan dicatat pada saat kas diterima oleh rekening Kas Daerah serta belanja diakui dan dicatat pada saat kas dikeluarkan dari rekening Kas Daerah. Aset, kewajiban dan Ekuitas Dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah.

## 2. Sistem Pembukuan Berpasangan

Sistem Pembukuan Berpasangan (*double entry system*) didasarkan atas persamaan dasar akuntansi, yaitu:

$$\text{ASET} = \text{UTANG} + \text{EKUITAS DANA.}$$

Setiap Transaksi dibukukan dengan mendebit suatu perkiraan dan mengkreditkan perkiraan yang lain.

SAPD sekurang-kurangnya meliputi prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur akuntansi asset tetap/barang milik daerah dan prosedur akuntansi selain kas. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah juga terdiri atas dua subsistem, yaitu:

### 1) Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

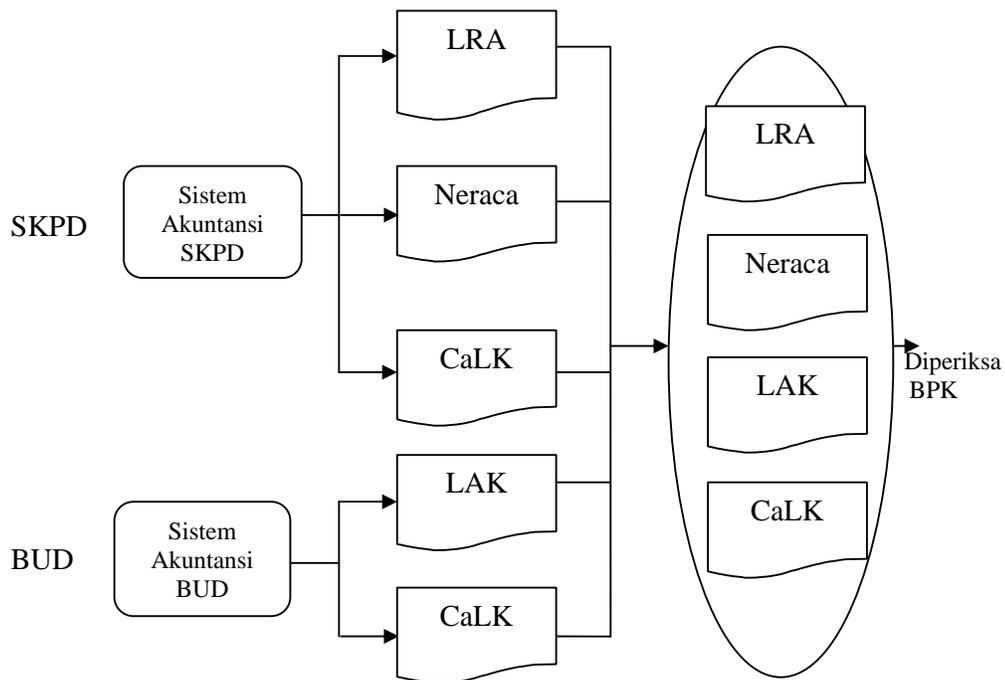
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), yang akan mencatat transaksi-transaksi yang dilakukan oleh level pemda seperti dana perimbangan, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil,

bantuan keuangan, belanja tidak terduga, transaksi-transaksi pembiayaan, pencatatan investasi, dan utang jangka panjang.

## 2) Sistem Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sistem akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD. Transaksi-transaksi yang terjadi di lingkungan satuan kerja harus dicatat dan dilaporkan oleh PPK SKPD.

Berdasarkan Permendagri No 13/2006, sistem akuntansi pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah (Kepala SKPKD). Pejabat ini bertugas untuk melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). Dalam sistem akuntansi ini, PPKD dibantu oleh PPK-SKPD melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. Pejabat ini bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan sistem dan prosedur penatausahaan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran di tingkat SKPD. Sistem Akuntansi Pemerintah daerah dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2 : Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

#### d. Siklus Akuntansi Pemerintah Daerah

Sistem akuntansi pemerintahan daerah disusun dalam rangka menjamin bahwa siklus akuntansi bisa berjalan dengan baik tanpa ada gangguan dan masalah, sebab apabila ada masalah pada satu bagian saja dari siklus akuntansi tersebut bisa berakibat laporan yang dihasilkan kurang berkualitas. Siklus akuntansi pada dasarnya sama untuk semua jenis organisasi, baik organisasi bisnis maupun pemerintah.

Siklus akuntansi dimulai dari adanya transaksi di pemerintah daerah, transaksi tersebut bisa berupa transaksi penerimaan dan pengeluaran kas maupun transaksi non kas yang mempengaruhi posisi keuangan organisasi. Untuk setiap transaksi harus didukung dengan bukti transaksi yang valid dan sah. Berdasarkan bukti transaksi tersebut maka bagian akuntansi akan membukukannya dalam

jurnal. Setelah dibukukan dalam jurnal, tahap selanjutnya adalah memposting ke buku besar. Buku besar merupakan kumpulan dari rekening yang sejenis yang didalamnya berisi mutasi rekening bersangkutan baik penambahan maupun pengurangan. Selain mencatat dalam buku besar, beberapa transaksi juga perlu dicatat di buku pembantu. Buku pembantu ini berhubungan dengan buku besar. Buku pembantu ini berisi data yang lebih rinci dari buku besar. Saldo di buku pembantu akan sama dengan saldo di buku besar.

Saldo tiap-tiap rekening kemudian diringkas dalam neraca saldo atau neraca percobaan (*trial balance*). Jadi neraca saldo merupakan daftar saldo dari seluruh rekening yang ada dalam sistem akuntansi pemerintah daerah dari neraca saldo tersebut kemudian perlu dilakukan penyesuaian sebelum bias dihasilkan laporan keuangan akhir yang nantinya akan dipublikasikan.

Pada prinsipnya, sistem akuntansi pemerintah daerah bisa berupa sistem akuntansi manual maupun berkomputerisasi. Jika pemerintah daerah sudah menggunakan sistem akuntansi berkomputer, maka beberapa tahap dalam siklus akuntansi bisa digantikan oleh komputer. Dengan demikian, apabila pemerintah daerah menggunakan sistem akuntansi berkomputer maka akan sangat menghemat waktu dan tenaga, informasi yang di hasilkan lebih tepat waktu, lebih bervariasi dan lebih berkualitas.

## **B. Penelitian Relevan**

Dalam penelitian relevan ini penulis belum banyak memasukkan hasil yang masih terkait dengan penelitian yang menghubungkan antara Standar

Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dikarenakan masih adanya keterbatasan dari sumber dan referensi.

Namun diantaranya dapat digunakan adalah penelitian yang dilakukan oleh Sherly (2008), yang meneliti mengenai penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada pemerintahan kota Padang, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Padang secara implisit belum mampu menerapkan SAP, hal ini dapat dilihat dari banyaknya Dinas di Kota Padang yang belum selesai dalam menyusun laporan keuangan. Serta adanya kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemko Padang, yaitu sumber daya manusia yang bukan dari akuntansi, dan kurangnya pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Pemko Padang.

Siska (2009) yang menguji pengaruh penerapan Standar akuntansi pemerintahan dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. Dalam penelitian Siska, populasi atau responden yang digunakan yaitu para auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sehingga hasilnya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya menunjukkan masih lemahnya Kualitas Laporan Keuangan Dari Pemerintah, karena pemerintah belum sepenuhnya menerapkan SAP dalam penyusunan laporan keuangan, dan masih lemahnya penerapan Sistem Akuntansi dalam pemerintahan.

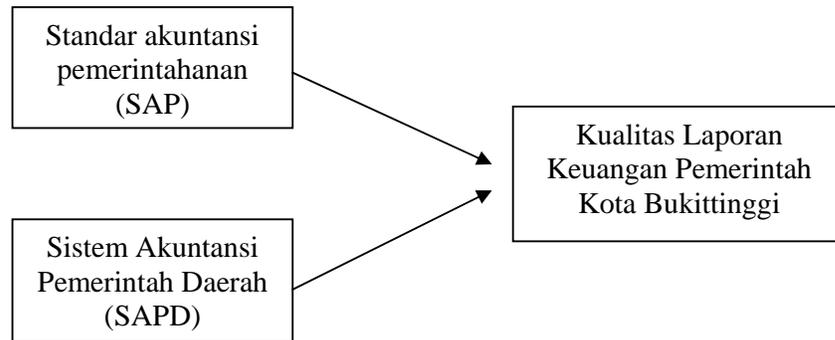
### **C. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan mengungkapkan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti berdasarkan batasan dan rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dan kajian teori yang telah dikemukakan di atas dapat dijelaskan bahwa untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan haruslah baik, dan menerapkan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang memadai di pemerintahan Kota Bukittinggi.

Kualitas laporan keuangan merupakan persyaratan normatif yang harus dipenuhi dalam penyusunan laporan keuangan agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan tersebut. Dalam usaha menciptakan kualitas laporan keuangan yang baik maka diperlukan adanya pedoman dalam proses penyusunan laporan keuangan. Standar akuntansi pemerintahan merupakan pedoman bagi pemerintah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Dengan demikian Standar akuntansi pemerintahan mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah merupakan cara bagi pemerintah untuk menyajikan laporan pertanggung jawaban berdasarkan sistem akuntansi yang telah ditetapkan. Untuk bisa menghasilkan laporan keuangan yang relevan dan handal, maka pemerintah daerah perlu memiliki sistem akuntansi keuangan yang handal. Jadi semakin baik penerapan sistem akuntansi pemerintah akan semakin baik pula kualitas penyajian laporan keuangan yang didapatkan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat digambarkan kerangka konseptual penelitian sebagai berikut :



**Gambar 3.**  
**Kerangka Konseptual**

#### **D. Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah dapat dilakukan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1</sub> : Penerapan Standar akuntansi pemerintahan (SAP) berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi.

H<sub>2</sub> : Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauhmana pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pengujian hipotesis yang telah diajukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan standar akuntansi pemerintahan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kota Bukittinggi.
2. Sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kota Bukittinggi.

#### **B. Keterbatasan**

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat keterbatasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Dimana dari model penelitian yang digunakan, diketahui bahwa variabel penelitian yang digunakan hanya dapat menjelaskan sebesar 29,1%. Sedangkan 70,9% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti. Sehingga

variabel penelitian yang digunakan kurang dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Penelitian ini merupakan metode survei menggunakan kuesioner tanpa dilengkapi dengan wawancara. Sebaiknya dalam mengumpulkan data dilengkapi dengan menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis.

### **C. Saran**

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas, maka peneliti menyarankan bahwa:

1. Pemerintah harus lebih optimal lagi dalam meningkatkan penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem akuntansi pemerintah daerah, karena dari hasil penelitian ini dan wawancara singkat pada beberapa responden diketahui bahwa belum terdapat pelatihan khusus untuk sistem akuntansi pemerintahan.
2. Penelitian ini masih terbatas pada penerapan standar akuntansi pemerintah daerah dan sistem akuntansi pemerintah daerah, untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan perluasan variabel penelitian untuk menemukan variabel-variabel lain yang berpengaruh kuat dengan kualitas laporan keuangan pemerintah.
3. Sebaiknya untuk penelitian selanjutnya akan lebih baik jika dilengkapi dengan wawancara sehingga dapat menggali semua hal yang menjadi tujuan penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. *Akuntansi Keuangan Daerah*. 2008. Jakarta : Salemba Empat
- Deddi Nordiawan. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- .2006. *Akuntansi Sektor Publik Lanjutan*. Jakarta: Salemba Empat
- .2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta : Salemba Empat
- Imam Ghozali. 2007. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indra Bastian. 2006. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.2006. *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta. Sinar Grafika
- Mahmudi. 2007. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Mudrajat Kuncoro. 2003. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*. [www.google.com](http://www.google.com) (17 Oktober 2010)
- Sherly Fardila.2008. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh Pemerintah Kota Padang Dalam Penyusunan Laporan Keuangan.*Skripsi*.Padang. FE UNP
- Siska Darman. 2009. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Studi: BPKP Provinsi Sumatera Barat). *Skripsi*. Padang. FE UNP
- Standar Akuntansi Pemerintahan Telaah Kritis PP No.24 Tahun 2005*. 2006.Yogyakarta : BPF
- Standar Akuntansi Pemerintahan*. 2006. Jakarta: Sinar Grafika
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta